BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompentensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Pejabat Pembuat Komitmen pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat kompetensi perencanaan, kompetensi pemilihan penyedia dan kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah semua berada pada kategori baik atau memadai.

1. Pada aspek perencanaan pengadaan barang/Jasa pemerintah melalui *E-Procurement*, berada pada kompetensi memadai, hal ini dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen telah memiliki pemahaman yang baik terhadap proses perencanaan pengadaan yaitu mampu mengidentifikasi kebutuhan, menyusun spesifikasi teknis, menyusun kerangka acuan kerja, menyusun harga perkiraan sendiri, membuat paket dan cara pengadaan serta memahami risiko pengadaan agar kebutuhan barang/jasa terpenuhi serta lebih efisien dan efektif serta mendukung efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
2. Kompetensi sumber daya manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada aspek Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pemerintah melalui *E-Procurement*, berada

pada kompetensi baik. Dimana Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan reviu dokumen pemilihan, penyusunan dan memberikan penjelasan dokumen pemilihan ke penyedia, menilai kualifikasi penyedia, evaluasi penawaran, serta pengelolaan sanggah, mengetahui negosiasi dan risiko pemilihan penyedia dilaksanakan dengan secara baik agar didapatkan barang yang berkualitas, menggunakan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Kompetensi sumber daya manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada aspek mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *E-Procurement*, berada pada kompetensi baik. Dimana Pejabat Pembuat Komitmen memiliki pengetahuan yang baik dalam merumuskan, memantau pelaksanaan kontrak dan mengendalikan kontrak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam aspek perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, maka rekomendasinya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kebijakan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengusulkan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda dapat segera diisi.
2. Reviu Sertifikati pengadaan barang/jasa : Mewajibkan dan memfasilitasi Pejabat Pembuat Komitmen yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti uji kompetensi guna memenuhi mandat regulasi
3. Diharapkan adanya kebijakan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala mengadakan pelatihan, seminar, workshop, atau sesi pelatihan yang fokus pada inovasi dalam *E-Procurement*, agar membantu tim menghadapi tantangan baru.